

CORPORATE GOVERNANCE DAN KINERJA LEMBAGA PERKREDITAN DESA DI KECAMATAN BLAHBATUH, GIANYAR

I Gede Cahyadi Putra¹

I Ketut Sunarwijaya²

^{1,2} (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar)

¹gdcahyadi@unmas.ac.id

Abstract

Good corporate governance is corporate governance that explains the relationship between all interested parties in a regulated and organized business. The principles of good corporate governance need to be applied by Local Credit Institution managers to improve the performance of the Local Credit Institution. This study aims to examine and obtain empirical evidence about the influence of the principles of good corporate governance which include transparency, accountability, responsibility, independence and fairness, on the performance of Local Credit Institution in Blahbatuh District. The number of samples used in this study were 36 Local Credit Institution with 108 respondents. Determination of the sample using the saturated sample technique. The data analysis technique used is multiple linear regression. The results showed transparency, accountability, responsibility, independence and fairness had a positive effect on the performance of Local Credit Institution in Blahbatuh, Gianyar, Bali.

Keywords: *Transparency, accountability, responsibility, independence, fairness, Local Credit Institution performance*

I. PENDAHULUAN

Tingkat pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator kemajuan suatu negara. Peran lembaga keuangan mempunyai andil yang sangat besar terhadap tingkat kemajuan dan pertumbuhan ekonomi tersebut.

Dana masyarakat Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 280/KMK.01/1989 dapat berasal dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Provinsi Bali mempunyai kekhasan sendiri mengenai lembaga keuangan, yaitu terdapat lembaga keuangan yang dikelola oleh Desa Adat yang disebut dengan Lembaga Perkreditan Desa atau disingkat LPD. LPD ini melayani masyarakat Desa Pakraman dalam hal pemenuhan dana baik berupa modal kerja atau modal usaha atau dipergunakan untuk membiayai kegiatan upacara keagamaan. LPD didirikan pada tahun 1985 dan berdiri di masing-masing Desa Pakraman yang ada di Bali.

Fungsi dari LPD adalah membantu Desa Adat dalam melaksanakan fungsi perberdayaan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan serta mengembangkan kegiatan ekonomi khususnya di Provinsi Bali. LPD yang terdapat pada masing-

-masing Desa Adat kepemilikannya sepenuhnya dimiliki oleh *krama desa*. *Krama desa* sendiri adalah warga atau masyarakat yang bertempat tinggal pada wilayah desa adat tertentu yang terikat oleh adat istiadat dan budaya berupa perarem desa.

LPD telah berkembang dan memberikan manfaat sosial, ekonomi dan budaya kepada warganya. Keberadaan LPD ini perlu dibina dan dilestarikan serta ditingkatkan kinerjanya (Suartana, 2009:12) untuk dapat mengoptimalkan peran LPD pada masing-masing desa pakraman.

Fungsi intermediasi dilaksanakan oleh LPD melalui penerimaan dana masyarakat melalui tabungan dan deposito serta penyaluran pinjaman berupa kredit ke warga desa pakraman. Suartana (2009;12) menyatakan bahwa tujuan dan fungsi LPD adalah memberikan kesempatan berusaha bagi warga desa pakraman, untuk menyerap tenaga kerja, melancarkan lalulintas pembayaran, dan sekaligus menghapus keberadaan para lintah darat. Hal tersebut berarti LPD diharapkan mampu membrantas kemiskinan dan meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan.

Penilaian kinerja LPD secara umum hampir sama dengan lembaga keuangan lainnya baik formal maupun informal. Kinerja merupakan *report* dari pencapaian pelaksanaan kegiatan entitas dalam mewujudkan tujuan perusahaan selama periode tertentu. Perusahaan wajib mengevaluasi dan memperbaiki kinerja secara berkala supaya kelangsungan perusahaan tetap terjaga dengan baik. Kinerja LPD dalam kajian ini diukur dengan indikator-indikator seperti kualitas, kuantitas, ketetapan waktu, efektivitas, dan kemandirian. Kaidah-kaidah manajemen yang digunakan LPD lebih sederhana dan sesuai dengan lingkungan LPD tersebut didirikan. Manajemen LPD dijalankan secara sederhana, akan tetapi LPD mampu memberikan manfaat-manfaat bagi masyarakat desa pakraman antara lain LPD memberikan pelayanan yang lebih mudah untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat desa pakraman, LPD memberikan pelayanan yang mampu menjangkau berbagai sektor usaha masyarakat desa pakraman, Keuntungan LPD dipergunakan untuk membiayai kegiatan keagamaan desa pakraman, dan LPD mampu mendukung pembangunan ekonomi diberbagai sektor aktivitas masyarakat desa pakraman (Partamawati, 2009).

Pengelolaan LPD dilakukan secara terpisah antara *krama desa* dengan pengurus LPD. Hal ini memungkinkan terjadi konflik kepentingan (keagenan). Konflik ini muncul ketika orang-orang dalam posisi yang berbeda mengorbankan kepentingan perusahaan untuk mewujudkan kepentingan pribadi. Pengelolaan LPD jika tidak mengedepankan prinsip-prinsip *good corporate governance* dengan baik, maka konflik seperti ini akan terus berlanjut dan menjadi sesuatu yang menghambat dari perkembangan usaha.

LPD dalam operasionalnya memperoleh dana pinjaman dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali. Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) harus diterapkan untuk mengurangi konflik kepentingan yang terjadi antara kerama adat sebagai pemegang dana dengan pengurus LPD yang menjadi pengelola dana serta menjamin terjaganya

hubungan baik antara semua *stakeholder*, menjamin semua hak-hak pihak yang berkepentingan dengan tujuan untuk menumbuhkan kepercayaan *krama desa* pakraman. Prinsip GCG yang terdiri dari 5 komponen yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan *fairness* merupakan dasar pengembangan sistem tata kelola organisasi yang diharapkan mampu membawa entitas pada pengelolaan kinerja yang lebih baik. Penerapan GCG secara tepat akan mampu mencegah kesalahan, kecurangan dalam operasional dan mampu membuahkan keputusan yang menguntungkan organisasi sehingga secara otomatis kinerja dari LPD akan semakin baik.

Transparansi adalah bagaimana unit usaha menjaga sikap untuk objektive, menyediakan informasi yang seimbang dan relevan, mudah diakses serta mudah dipahami oleh para pihak-pihak yang berkepentingan. Transparansi menjamin ketersediaan informasi sama atau tidak terjadi asimetri informasi antara pengurus dengan warga desa prakraman di LPD. Penelitian Bulandari dan Damayanthi (2015) menemukan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja LPD Kabupaten Badung. Hasil penelitian Astuti (2013) menemukan hasil bahwa transparansi justru menyebabkan kinerja menurun. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Ekonomi Dan Bisnis Kabupaten Surakarta

Akuntabilitas merupakan tanggungjawab entitas dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan tetap mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan pihak-pihak yang lain yang berkepentingan. Hasil penelitian Dewi dan Dwijayanti (2014) menemukan semakin tinggi akuntabilitas maka kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Gianyar juga semakin mengalami kenaikan. Hasil penelitian yang berbeda diperoleh oleh Arifani (2018) yang menemukan justru akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap kinerja Pemerintahan Kota Jayapura.

Responsibilitas adalah bagaimana unit usaha mentaati peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab terhadap masyarakat

dan lingkungan yang ada disekitarnya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Setyawan dan Putri (2013) yang dilakukan pada LPD di Mengwi kabupaten Badung menemukan bahwa responsibilitas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa. Semakin responsif pengelola LPD maka dibarengi oleh kinerja LPD yang semakin meningkat.

Prinsip selanjutnya adalah independensi. Independensi merupakan sebuah prinsip perusahaan yang tidak memihak kepada salah satu pihak, tidak memiliki keterikatan dengan pihak manapun dalam perusahaan. perusahaan yang dikelola secara independen mampu membuat masing-masing organ dalam perusahaan tidak saling mendominasi dan saling mengintervensi satu pihak dengan pihak yang lain. Sandraningsih dan Putri (2015) melakukan penelitian di kecamatan Abiansemal menemukan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kinerja LPD. Hasil penelitian yang berbeda dihasilkan oleh Sastra dan Erawati (2017) menemukan bahwa semakin tinggi independensi LPD justru semakin menurun kinerjanya. Penelitian ini dilakukan di seluruh LPD yang ada di kecamatan Abiansemal, Badung.

Fearnese atau kewajaran adalah pertimbangan perusahaan terhadap kepentingan-kepentingan semua pihak yang berkaitan dengan perusahaan. Prinsip kewajaran dan kesetaraan harus selalu diperhatikan manajemen perusahaan untuk menjaga hubungan baik dengan para pemegang saham. Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2017) menemukan bahwa kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Badung. Sedangkan penelitian Sastra dan Erawati (2017) menemukan sebaliknya bahwa kewajaran mempunyai pengaruh yang negatif terhadap kinerja LPD di Kecamatan Abiansemal, Badung.

Kajian-kajian tentang tata kelola operasional LPD yang mengedepankan prinsip-prinsip GCG merupakan faktor yang sangat penting dan telah dibuktikan dengan hasil penelitian. *Good corporate governance* mengantarkan organisasi kepada pencapaian visi dan misi dari LPD. GCG memberikan prinsip serta memberikan jaminan keamanan dana dan keuntungan di LPD.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis peran dari *good corporate governance* dalam meningkatkan kinerja LPD. Penelitian dilakukan pada kecamatan Blahbatuh, kabupaten Gianyar. *Corporate governance* diukur dengan variabel transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran.

II. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Teori Keagenan

Teori keagenan menjelaskan bahwa perusahaan adalah pertemuan antara pemegang saham sebagai pemberi dana dengan manajemen sebagai pengelola dana. Tujuan perusahaan adalah untuk mencapai kesejahteraan yang setinggi-tingginya untuk pemegang saham. Tetapi dalam kenyataannya tujuan tersebut sering tidak sesuai. Manajer perusahaan yang diangkat oleh pemegang saham untuk menjalankan usaha seringkali bertindak untuk mementingkan dirinya sendiri. Tujuan manajer yang bertentangan dengan kepentingan pemegang saham sering menimbulkan konflik kepentingan antara pemegang saham dengan manajemen, hal ini sering disebut dengan *agency problem*.

Teori keagenan menjelaskan tentang hubungan keagenan antara prinsipal yang mendelegasikan pekerjaan kepada *agent*. Permasalahan yang terjadi adalah prinsipal tidak mampu memverifikasi agen dalam melakukan tugasnya apakah tugas tersebut sudah dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan aturan yang berlaku. Permasalahan yang lain timbul pada pembagian risiko yang timbul pada saat terjadi perbedaan sikap antara prinsipal dan agen mengenai sebuah risiko yang terjadi. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan mengenai hubungan agensi sebagai suatu kontrak dibawah satu atau lebih prinsipal yang melibatkan agen dalam melaksanakan beberapa pelayanan kepada mereka yang mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan perusahaan kepada agen. Teori keagenan berfokus penentuan kontrak yang paling efisien yang mendasari hubungan antara *principal* dan agen.

Konflik keagenan juga terjadi pada pengelolaan LPD di Bali. Pengelolaan LPD dilakukan oleh pengurus LPD yang bertanggungjawab langsung kepada Bendesa Adat (kepada Desa Adat). Dalam hal ini pengelola bertindak sebagai agen, sedangkan prinsipal adalah warga atau *krama desa pakraman* yang mempercayakan pengelolaan dana melalui pengurus LPD. Konflik kepentingan akan terjadi ketika pengelola mempunyai kesempatan untuk memakmurkan dirinya sendiri dan mengindahkan kesejahteraan *krama desa pakraman*. Konflik ini akan mampu diminimalisasi ketika prinsip *good corporate governance* (GCG) diterapkan secara baik. GCG adalah konsep yang didasari pada teori keagenan yang berfungsi untuk memberikan keyakinan kepada *krama desa pakraman* bahwa dana yang dipercayakan kepada pengelola LPD menghasilkan tingkat pengembalian atau keuntungan yang optimal. Selanjutnya konsep GCG juga memberikan keyakinan bahwa pengelola LPD dalam menjalankan operasionalnya tidak melakukan kecurangan atau penggelapan atas dana yang sudah diinvestasikan dan *krama desa pakraman* dapat melakukan kontrol kepada pengelola LPD melalui pengangkatan badan pegawai dalam paruman desa adat. Penerapan GCP pada LPD diharapkan mampu membawa iklim tatakelola yang baik sesuai dengan kelima prinsip GCP yaitu entitas dijalankan atas dasar transparan, akuntabel, responsif, independen, dan keterbukaan sehingga mampu menekan biaya *agency* dan akhirnya kinerja LPD semakin meningkat untuk memberikan kemakmuran kepada warga desa pakraman.

2.2 Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa

Prinsip transparansi adalah adanya jaminan kebebasan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengakses atau memperoleh informasi tentang pertanggungjawaban organisasi. *Stakeholders* mempunyai hak untuk mengetahui semua informasi yang ada dalam organisasi mengenai seluruh pengelolaan sumber daya yang ada.

Pada LPD membangun kepercayaan *krama desa* melalui penciptaan transparansi yang mengedepankan penyampaian informasi yang transparan kepada seluruh *krama desa pakraman*. Kinerja LPD meningkat dengan adanya kepercayaan *krama desa* karena LPD mampu mengedepankan keterbukaan dan kemudahan dalam mengakses berbagai informasi dalam LPD.

Penelitian yang dilakukan Sari (2017) menemukan bahwa prinsip-prinsip transparansi yang diterapkan pada LPD mampu meningkatkan kinerja LPD di Kabupaten Badung. Hasil yang sama juga diperoleh oleh Setyawan dan Putri (2013) yang menghasilkan kesimpulan bahwa semakin tinggi prinsip transparansi yang diterapkan berpengaruh positif terhadap kinerja LPD di kecamatan Mengwi. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

H1: Terdapat hubungan positif antara transparansi dengan kinerja lembaga perkreditan desa.

2.3 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa

Prinsip akuntabilitas merupakan prinsip tentang kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggung-jawaban elemen dalam organisasi. Kinerja yang berkesinambungan dicapai oleh organisasi tidak bisa dilepaskan dari unsur pertanggungjawaban. Mencapai kinerja yang baik sebuah organisasi harus mampu mempertanggungjawabkan operasionalnya secara benar, terukur, serta tetap memperhitungkan kepentingan pengelola dan *stakeholders*.

Beberapa penelitian tentang prinsip akuntabilitas dihubungkan dengan kinerja sudah pernah dilakukan, seperti penelitian Bulandari dan Damayanthi (2015) yang menemukan bahwa semakin baik akuntabilitas mampu meningkatkan kinerja LPD yang ada di Kabupaten Badung. Hasil penelitian Dewi dan Dwijayanti (2014) yang melakukan penelitian pada LPD di kabupaten Gianyar menemukan hasil bahwa variabel akuntabilitas mempunyai hubungan yang positif terhadap kinerja LPD. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dikembangkan adalah

sebagai berikut:

H2: Terdapat hubungan positif antara akuntabilitas dengan kinerja lembaga perkreditan desa.

2.4 Pengaruh Responsibilitas terhadap Kepercayaan Masyarakat pada Lembaga Perkreditan Desa

Prinsip responsibilitas adalah sebuah prinsip dalam pengelolaan organisasi yang menekankan pada proses perundang-undangan yang harus ditaati oleh organisasi. Perusahaan harus menumbuhkan sikap yang selalu mengedepankan proses perundang-undangan dalam mengelola usahanya dan selalu memperhatikan lingkungan dimana perusahaan itu berada. Prinsip ini sangat diperlukan untuk kontinuitas usaha karena tanpa mendapatkan legitimasi dari lingkungan sekitar niscaya perusahaan akan mampu bertahan. Prinsip responsibilitas yang tinggi akan mampu membawa organisasi menuju ke kinerja yang semakin baik.

Penelitian tentang variabel responsibilitas di LPD dilakukan oleh Setyawan dan Putri (2013) yang menemukan hasil bahwa semakin responsif pengelola LPD menyebabkan kinerja LPD semakin baik. Penelitian ini dilakukan pada seluruh LPD yang ada di kecamatan Mengwi, Badung. Hasil penelitian yang sama dilakukan oleh Pradnyaswari dan Putri (2016) yang mendapatkan hasil bahwa responsibilitas mempunyai berpengaruh yang positif terhadap kinerja keuangan. Penelitian ini dilakukan pada Koperasi yang ada di kabupaten Klungkung. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

H3: Terdapat hubungan positif antara responsibilitas dengan kinerja lembaga perkreditan desa.

2.5 Pengaruh Independensi terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa

Prinsip independensi merupakan sebuah prinsip dalam pengelolaan organisasi yang menekankan objektivitas dari manajemen dalam mengambil sebuah keputusan. Perusahaan harus dikelola secara profesional, menghindari benturan kepentingan dan tidak memihak kepada salah satu

pihak yang ada di dalam perusahaan. Keputusan-keputusan yang diambil oleh manajemen harus independen artinya keputusan atau kebijakan yang objektif tidak mewakili kepentingan salah satu pihak dalam perusahaan. Pada LPD juga ditemui hal yang sama ketika pengelola LPD mengambil sebuah kebijakan, maka kebijakan tersebut harus diambil secara objektif mengedepankan kepentingan bersama dan tidak merugikan kepentingan *krama desa* pakraman. Prinsip independen yang mampu di jalankan oleh LPD akan mampu meningkatkan kinerja secara berkesinambungan.

Penelitian mengenai prinsip independensi di LPD dilakukan oleh Dewi dan Dwijayanti (2014) yang menemukan hasil bahwa independensi yang semakin tinggi dijalankan oleh pengelola LPD mampu membawa kinerja LPD semakin meningkat. Penelitian tersebut dilakukan pada seluruh LPD yang ada di kabupaten Gianyar, Bali. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Bulandari dan Damayanti (2015) menghasilkan temuan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kinerja LPD di Kabupaten Badung. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

H4: Terdapat pengaruh positif antara independensi dengan kinerja lembaga perkreditan desa.

2.6 Pengaruh Kewajaran terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa

Prinsip kewajaran merupakan sebuah prinsip yang menekankan pengelolaan perusahaan secara adil dan menjaga kesetaraan perusahaan dalam memenuhi kepentingan para pihak yang berkepentingan yang timbul dari perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bukhori (2012) menyatakan bahwa atas dasar perlakuan yang setara (*equal treatment*) dan asas manfaat yang wajar.

Penelitian di LPD tentang variabel kewajaran dilakukan oleh Sari (2017). Hasil penelitian menemukan bahwa bahwa kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja LPD Kabupaten Badung. Hasil penelitian selanjutnya

dilakukan Pradnyaswari dan Putri (2016) menemukan bahwa prinsip kewajaran yang diterapkan oleh koperasi di kabupaten Klungkung mampu meningkatkan kinerjanya. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

H5: Terdapat pengaruh positif antara kewajaran dengan kinerja lembaga perkreditan desa.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang ada di Kecamatan Blahbatuh, kabupaten Gianyar, Bali. Variabel bebas dan variabel terikat dalam penelitian diukur menggunakan kuesioner. Responden diminta memberikan tanda centang di sebelah masing-masing pernyataan yang disediakan variabel bebas terdiri dari lima prinsip GCP yang dihubungkan dengan satu variabel terikat yaitu kinerja LPD, berikut adalah masing-masing definisi dan pengukuran variabel penelitian:

1) Transparansi

Sikap keterbukaan pengurus LPD dalam menjalankan kegiatan operasional lembaga. Aspek transparansi ini akan diukur dari jumlah anggota badan pengawas yang dimiliki LPD, kemampuan pengurus LPD dalam menyediakan laporan keuangan dan pertemuan antara pengurus, badan pengawasan dan *krama desa*

2) Akuntabilitas

Pengelola LPD harus dapat mempertanggungjawabkan kepercayaan masyarakat secara wajar dan transparan akan investasi atau pengaruh asset masyarakat pada LPD. Aspek akuntabilitas diukur dari pemahaman ketua dan pengelola LPD terhadap visi, misi, dan tujuan LPD, peran dan tanggungjawab ketua dan pengelola LPD dan proses penyusunan laporan keuangan beserta bukti transaksi.

3) Responsibilitas

Pengelolaan LPD harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan dalam operasionalnya melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan perarem yang berlaku kepada *krama desa* pakraman. Dalam penelitian ini variabel responsibilitas diukur berdasarkan ketaatan ketua dan pengelola LPD terhadap peraturan perundang-

-undangan dan peraturan LPD, kepedulian LPD terhadap lingkungan dan sosial, dan pengambilan keputusan.

4) Independensi

Ketua dan pengelola LPD dalam mengambil keputusan bebas dari intimidasi dari pihak lain sehingga terhindar dari pihak yang merugikan. Variabel Independensi diukur berdasarkan keputusan ketua yang objektive yang terhindar dari kepentingan semua pihak yang dapat merugikan kinerja LPD, ketua LPD menghindari terjadinya dominasi dan tekanan oleh pihak manapun.

5) Kewajaran

Prinsip kewajaran adalah adanya keadilan dan kesetaraan untuk semua kalangan (*krama desa* pakraman, pemerintah dan pengelola) sesuai dengan perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku. Variabel kewajaran diukur berdasarkan kesempatan *krama desa* pakraman/anggota LPD berpendapat, keadilan pengelola terhadap anggota, dan memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan tenaga kerja di LPD bagi *krama desa* pakraman.

6) Kinerja Lembaga Perkreditan Desa, yang diukur berdasarkan lima komponen yaitu dari segi kualitas pelayanan, kuantitas hasil kegiatan, ketepatan waktu penyampaian laporan, efektivitas, dan kemandirian.

Penelitian dilakukan pada 36 LPD yang ada di kecamatan Blahbatuh. Populasi penelitian terdiri dari ketua, karyawan dan nasabah LPD, sampel menggunakan teknik sampel jenuh. Teknik analisis data menggunakan uji regresi linear dan sebelumnya dilakukan pengujian instrumen penelitian berupa uji validitas dan reliabilitas. Persamaan model regresi penelitian adalah sebagai berikut:

$$KLPD = \alpha + \beta_1TKS + \beta_2AKT + \beta_3RES + \beta_4IND + \beta_5KWR + \varepsilon$$

Keterangan:

- α : konstanta
- β : koefisien regresi
- KLPD : Kinerja LPD
- TKS : transparansi
- AKT : akuntabilitas
- RES : responsibilitas
- IND : independensi
- KWR : kewajaran
- ε : *error term*

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pengujian Instrumen

Kuisoner penelitian dikatakan valid apabila item-item pertanyaan dalam kuisoner mampu untuk mengukur suatu yang akan diukur oleh kuisoner tersebut. Pengujian validitas tiap butir pertanyaan menggunakan uji bivariat, yaitu mengkorelasi skor setiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah setiap skor butir. Apabila korelasi skor butir pertanyaan dengan skor total diatas 0,3 maka pertanyaan tersebut dikatakan kuat dan dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut memiliki validitas konstruksi yang baik (Sugiyono, 2017:178).

Hasil validitas instrumen disajikan pada Tabel 1 (Lampiran). Berdasarkan pada Tabel 1 (Lampiran) dapat dilihat bahwa semua indikator pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel dalam penelitian memiliki nilai korelasi positif dan lebih besar dari 0,3 dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,5. Hasil ini menunjukkan bahwa semua indikator pertanyaan dalam penelitian adalah valid.

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur apakah suatu kuisoner yang merupakan indikator dari variabel memiliki konsistensi. Pengukuran reliabilitas menggunakan nilai *Cronbach Alpha*. Nilai *Cronbach Alpha* diatas 0,70 menunjukkan bahwa instrumen penelitian reliabel. Hasil uji reliabilitas instrumen disajikan pada Tabel 2 (Lampiran). Berdasarkan hasil pengujian dapat dilihat bahwa seluruh variabel memiliki *Cronbach' alpha* lebih besar dari 0,7. Hasil ini menunjukkan bahwa semua data yang digunakan dalam kuisoner dikatakan reliabel.

4.2 Hasil Analisis Data

Variabel pertama yaitu transparansi (TR) mempunyai koefisien regresi sebesar 0,788 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja LPD di kecamatan Blahbatuh, Gianyar.

Variabel akuntabilitas (AK) mempunyai koefisien regresi sebesar 0,526 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang jauh lebih kecil

dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas yang dimiliki LPD di Kecamatan Blahbatuh, Gianyar berpengaruh positif terhadap kinerjanya.

Variabel tanggungjawab (RES) mempunyai koefisien regresi sebesar 0,100 dengan nilai signifikansi sebesar 0,049 yang berada di bawah 0,05. Hal ini berarti tanggungjawab mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja LPD di Kecamatan Blahbatuh, Gianyar.

Variabel independensi (IND) mempunyai koefisien regresi sebesar 0,757 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kinerja LPD di kecamatan Blahbatuh, Gianyar.

Variabel terakhir yaitu kewajaran (KW) mempunyai koefisien regresi sebesar 0,505 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja LPD di kecamatan Blahbatuh, Gianyar.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1 Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Blahbatuh

Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa variabel transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja LPD-LPD yang ada di Kecamatan Blahbatuh, Gianyar. Transparansi adalah keterbukaan informasi dan penyediaan kemudahan akses informasi kepada semua pengguna informasi yang berkaitan dengan organisasi. LPD semakin transparansi mengungkapkan informasinya akan meningkatkan kepercayaan *krama desa pakraman* (warga desa adat). *Krama desapakraman* dapat mengetahui seluruh informasi secara benar dan terbuka mengenai pengelolaan sumber daya-sumber daya LPD, sehingga meningkatkan nilai dan citra LPD. Pengelola LPD di Blahbatuh sudah melaksanakan prinsip transparansi ini melalui keterbukaan informasi. Keterbukaan tersebut berupa penyajian laporan keuangan yang tepat waktu setiap periode dan di akhir tahun terdapat pertanggungjawaban dari ketua LPD melalui paruman desa adat. Keterbukaan informasi tersebut mampu mendorong kepercayaan nasabah

LPD dalam menanamkan dana dan melakukan pinjaman sehingga kinerja LPD di kecamatan Blahbatuh semakin meningkat.

4.3.2 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Blahbatuh

Hasil pengujian data diperoleh bahwa akuntabilitas yang semakin baik dibarengi oleh kinerja LPD di Kecamatan Blahbatuh, Gianyar yang semakin bagus. Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggung-jawaban elemen organisasi. Salah satu persyaratan mencapai kontinuitas kinerja adalah dengan mempertanggung-jawabkan kinerjanya secara akuntabilitas benar, terukur, serta tetap memperhatikan kepentingan pengelola dan pemangku kepentingan yang lain. Hal ini akan menjadi nilai tambah untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Hasil penelitian ini mengidentifikasi bahwa semakin jelas tanggung jawab struktur organisasi dalam LPD, serta semakin LPD memahami visi, misi, memahami peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan kemampuannya, laporan keuangan beserta bukti transaksi telah didokumentasikan dengan baik maka operasi LPD semakin efektif sehingga kinerja LPD akan semakin meningkat.

4.3.3 Pengaruh Responsibilitas terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Blahbatuh

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh bahwa variabel responsibilitas mempunyai hubungan yang positif terhadap kinerja LPD di kecamatan Blahbatuh. Pengelola LPD sudah mampu menerapkan prinsip responsibilitas pada LPD yang berkaitan ketaatan aturan perundang-undangan dan pemahaman terhadap peraturan tersebut. Kepatuhan pengelola LPD di Kecamatan Blahbatuh terhadap peraturan berupa awig-awig dan melaksanakan tanggung jawab kepada *krama desa pakraman* serta peduli terhadap kelestarian lingkungan. Penerapan prinsip ini, mampu menyadarkan bahwa LPD dalam kegiatan operasionalnya, LPD mempunyai peran untuk bertanggung jawab kepada *krama desa pakraman*

dan membuat pengelola LPD menyadari bahwa kegiatan operasionalnya seringkali menghasilkan dampak yang negatif yang harus ditanggung kepada *krama desa pakraman*. Kesadaran akan tanggungjawab tersebut mendorong LPD untuk melakukan hal-hal yang positif sehingga mampu meningkatkan kinerja LPD secara keseluruhan.

4.3.4 Pengaruh Independensi terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Blahbatuh

Berdasarkan hasil analisis data variabel independensi mempunyai hubungan yang searah dengan kinerja LPD yang ada di Kecamatan Blahbatuh, Gianyar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin independen pengurus LPD dalam melaksanakan operasional organisasi dibarengi oleh kinerja LPD yang semakin meningkat. Pengelola LPD di kecamatan Blahbatuh sudah mampu mengatasi tekanan dari berbagai pihak dan mengambil keputusan secara mandiri sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya. LPD dikelola sesuai dengan peraturan dan dijalankan secara profesional. Kepala LPD dalam menjalankan tugas dan badan pengawas dalam melaksanakan peran pengawasan organisasi bebas dari intervensi pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan. Hal tersebut mampu mendorong kinerja LPD semakin baik.

4.3.5 Pengaruh Kewajaran terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Blahbatuh

Berdasarkan analisis variabel kewajaran mempunyai hubungan yang positif terhadap kinerja LPD di kecamatan Blahbatuh, Gianyar.

Para pengelola LPD di kecamatan Blahbatuh sudah mampu menerapkan prinsip yang menekankan pengelolaan organisasi secara adil dan menjaga kesetaraan organisasi dalam memenuhi kepentingan para pihak yang berkepentingan yang timbul dari perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelola LPD di kecamatan Blahbatuh dalam melaksanakan operasinya mampu memperhatikan kepentingan *krama desa pakraman* berdasarkan prinsip kewajaran dan kesetaraan,

memberikan adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi segala hak *krama desapakrama*. Penerapan prinsip ini oleh pengelola membuat adanya perlindungan kepentingan *krama desa pakraman* dalam pengelolaan aset secara baik dan berhati-hati. Pengelolaan aset yang efektif dan efisien tersebut menyebabkan kinerja LPD secara keseluruhan juga meningkat.

V. SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa variabel GCP yang diukur dengan lima prinsip yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran mempunyai hubungan yang positif terhadap kinerja LPD di Kecamatan Blahbatuh. Hal ini mengindikasikan bahwa Lembaga perkreditan Desa di wilayah Kecamatan Blahbatuh, Gianyar sudah menerapkan tatakelola organisasi yang baik. Penerapan prinsip-prinsip ini mampu mendorong sinergitas dari pengelola LPD, badan pengawas dan *krama desa* dan semua pemangku kepentingan yang lain, sehingga kegiatan operasional LPD berjalan dengan baik dan hal tersebut mendorong kinerja LPD mengalami peningkatan.

Penelitian ini hanya dilakukan pada lingkup Kecamatan yaitu di LPD yang beroperasi di wilayah Kecamatan Blahbatuh, Gianyar. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan wilayah penelitian untuk mendapatkan hasil yang mampu digeneralisasi pada seluruh kabupaten di Bali. Selanjutnya penelitian ini belum memperhitungkan faktor-faktor eksternal LPD seperti peraturan pemerintah, dan ketidakpastian lingkungan. Pada penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan hal tersebut untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Arifani, Cindy. 2018. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berbasis *Value For Money* (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Jayapura) *Jurnal Akuntansi & Keuanagn Daerah*. Vol 13, nomer 1, hal:68-82

Asrini, Ni Wayan. 2014. Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2008-2011. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Mahasaraswati Denpasar.

Barlian, R.S.2003. *Manajemen Keuangan*. Edisi Kelima. Cetakan Kedua Yogyakarta:Literatur Lintas Media

Bulandari, I Gusti Agung Wita. 2015. Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Badung. *Skripsi*. Universitas Udayana

Dewi, Kadek Krismaya. 2014. Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* pada Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kabupaten Gianyar Bali. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Udayana, Vol.7 No. 3,hal:559-573.

Erawati, Ni Made Adi. 2017. Pengaruh Penerapan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada Kinerja Keuangan. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol 14. No 2, hal:145-180.

Forum for *Corporate Governance* in Indonesia (FCGI).2001. *Seri Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance)*. Jakarta.

Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan IBM Program SPSS 23*. Semarang: BPFE Universitas Diponegoro.

Hardikasari, Eka. 2011. Pengaruh Penerapan *Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan pada Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2006-2008. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.

Jitmau, Fanny. 2015. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Fungsi Pemeriksa Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris di Kabupaten Sorong. *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi*

Like, Monisa Wati. 2012. Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Di Bursa Efek Indonesia. *Skripsi*.

- Falkutas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Nopiani, Diah Kadek. 2015. Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Bank Perkreditan Rakyat di Bali. *E-journal*. Jurnal Universitas Pendidikan Ganesha.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 tentang tentang Lembaga Perkreditan Desa
- Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 44 Tahun 2017 tentang peraturan pelaksana Perda No. 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa
- Putri, Kadek Krismayana Dewi. 2006. Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* pada Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa Kabupaten Gianyar Bali. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol 7. No. 3, h:559-573.
- Rahmatika, Kimizi. 2015. Pengaruh Penerapan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi pada PT Angkasa Raya Pura II). *Jurnal Akuntansi Universitas Riau*
- Sandraningsih, Ni Kadek Budi. 2016. Pengaruh Prinsip *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana
- Sastra, I Made Bhaskara. 2017. Pengaruh Penerapan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan budaya Tri Hita Karana pada Kinerja Keuangan. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol 19. No.1, hal.421-451.
- Setyawan, Komang Meitradi. 2013. Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. *E-journal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*.
- Shill, N.C. 2008. *Accounting for Good Corporate Governance*. JOAAG. 3(1). pp:22-31
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan kuantitatif, kualitatif, Kombinasi, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarwan, Eko. 2015. Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah (studi kasus pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) di Indonesia periode 2010-2013. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Hasil Uji Validitas Variabel Independen dan Variabel Dependen

	<i>Parson Correlation</i>	<i>Sig</i>	Keterangan
Transparansi (TR)			
TR.1	0,969	0,000	Valid
TR.2	0,927	0,000	Valid
TR.3	0,821	0,000	Valid
Akuntabilitas (AK)			
AK.1	0,832	0,000	Valid
AK.2	0,804	0,000	Valid
AK.3	0,895	0,000	Valid
Responsibilitas (RES)			
RES.1	0,860	0,000	Valid
RES.2	0,867	0,000	Valid
RES.3	0,831	0,000	Valid
Independensi (IND)			
IND.1	0,852	0,000	Valid
IND.2	0,719	0,000	Valid
Kewajaran (KW)			
KW.1	0,832	0,000	Valid
KW.2	0,904	0,000	Valid
KW.3	0,837	0,000	Valid
Kinerja LPD			
KLPD1	0,504	0,000	Valid
KLPD2	0,833	0,000	Valid
KLPD3	0,661	0,000	Valid
KLPD4	0,720	0,000	Valid
KLPD5	0,812	0,000	Valid

Sumber: Data diolah (2019)

Tabel 2
Hasil Uji Reabilitas Instrumen Penelitian

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
(TR)	0,880	Reliabel
(AK)	0,825	Reliabel
(RES)	0,798	Reliabel
(IND)	0,704	Reliabel
(KW)	0,820	Reliabel
(KLPD)	0,741	Reliabel

Sumber: Data diolah (2019)

Tabel 3
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	t-value	Sig
Constant	3,525	2,738	0,008
TR	0,788	7,240	0,000
AK	0,526	6,647	0,000
RES	0,100	1,997	0,049
IND	0,757	7,333	0,000
KW	0,505	4,216	0,000
<i>Adj R²</i>	0,752		
<i>F-value</i>	54,413		
<i>Sig F</i>	0,000		

Sumber: Data diolah (2019)